

# **LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT**

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS  
TRIWULAN 2 TAHUN 2023**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**



## LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT****HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS  
TRIWULAN 2 TAHUN 2023**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Senin, 3 Juli 2023



**Top Management,**

**Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196404011992031005**

**Sekretaris Tim Survei,**

**ANDI SITI NURASIAWATI, S.H.**  
**NIP. 198107302006042022**

**Ketua Tim Survei,**

**SUTISNA SAWATI, S.H.**  
**NIP. 197311231999031007**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan 2 Tahun 2023.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat jbagi upaya peningkatan kualita pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 3 Juli 2023

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAUDUL.....</b>                                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                      | 5         |
| B. Tujuan dan Sasaran.....                                                                                  | 6         |
| C. Prinsip.....                                                                                             | 6         |
| D. Pelaksanaan.....                                                                                         | 7         |
| E. Tahapan Pelaksanaan.....                                                                                 | 7         |
| <b>BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA<br/>LAYANAN PENGADILAN .....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR<br/>TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN<br/>MASYARAKAT .....</b> | <b>11</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>                                                                | <b>12</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                          | 12        |
| B. Rekomendasi.....                                                                                         | 12        |
| <b>RUJUKAN:.....</b>                                                                                        | <b>14</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....</b>                                                                              | <b>15</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Maksud Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Prinsip**

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

### **1. Transparan**

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

### **2. Partisipatif**

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

### 3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

### 4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

### 5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

### 6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

## D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan APRIL s/d JUNI 2023.

## E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :  
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

## BAB II

### HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 204 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **100,00% atau pada nilai 4,00**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6  
Hasil  
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

| No  | Unsur Pelayanan        | Nilai Rata-rata |
|-----|------------------------|-----------------|
| U1  | Manipulasi Peraturan   | 4,000           |
| U2  | Penyalahgunaan Jabatan | 4,000           |
| U3  | Menjual Pengaruh       | 4,000           |
| U4  | Transaksi Biaya        | 4,000           |
| U5  | Biaya Tambahan         | 4,000           |
| U6  | Hadiah                 | 4,000           |
| U7  | Transparansi Biaya     | 4,000           |
| U8  | Percaloan              | 4,000           |
| U9  | Perbuatan Curang       | 4,000           |
| U10 | Transaksi Rahasia      | 4,000           |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
|  | Total     | <b>40,000</b> |
|  | Rata Rata | <b>4,00</b>   |

### BAB III

## RENCANA TINDAK LANJUT

## HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

| No | Prioritas Unsur        | Program/Kegiatan                                                                                            | Tahun 2023   |             |              |             |             |             | Penanggungjawab         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|    |                        |                                                                                                             | Bln.<br>Juli | Bln.<br>Ags | Bln.<br>Sept | Bln.<br>Okt | Bln.<br>Nov | Bln.<br>Des |                         |
| 1  | Manipulasi Peraturan   | Penanaman nilai-nilai perilaku kepada para petugas pelayanan melalui pembinaan secara berkala oleh Pimpinan | √            | √           | √            | √           | √           | √           | Panitera dan Sekretaris |
| 2  | Penyalahgunaan Jabatan |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 3  | Menjual Pengaruh       |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 4  | Transaksi Biaya        |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 5  | Biaya Tambahan         |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 7  | Transparansi Biaya     |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 8  | Percaloan              |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 9  | Perbuatan Curang       |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |
| 10 | Transaksi Rahasia      |                                                                                                             |              |             |              |             |             |             |                         |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **4,000** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,000**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **4,000**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **4,000**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,000**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4,000**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,000**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,000**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**;

#### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan 2 Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

## **RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

LOGIN

Beranda / SPAK / Detail

1

Beranda

Statistik

Kontak Kami

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden  
Nama serta diri responden

2 Layanan  
Layanan

3 Form Kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama

Umur / Jenis Kelamin \*

Nomor HP \*

Domisili \*

Pendidikan \*

Pekerjaan \*

boleh insial atau tidak diisi...

tahun

+62

Pilih Wilayah

Pilih Pendidikan

Pilih Pekerjaan

>

>

>

>

>

Kembali

Selanjutnya

[Beranda](#)
[SPAK](#) / [Detail](#)

[LOGIN](#)

[Beranda](#)
[Statistik](#)
[Kontak Kami](#)

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

### Dashboard

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

**Data Responden**  
Nama serta detail responden

**Form Kuesioner**  
Isian form kuesioner SPAK

**Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

**Layanan**  
Layanan

**Layanan yang Anda dapatkan**

**Jenis Layanan \***

Pilih Layanan Yang Didapat

**Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? \***

Pilih Layanan Yang Didapat

**Kembali**

**Selanjutnya**

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

LOGIN

Beranda
Statistik
Kontak Kami

Dashboard
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Beranda
SPAK
Detail

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

1
Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

- ☐ Tidak Sesuai Prosedur
- ☐ Jarang Sesuai Prosedur
- ☐ Sering Sesuai Prosedur
- ☐ Selalu Sesuai Prosedur

2
Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

- ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3
Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

4
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

5
Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

6
Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

7
Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

8
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

9
Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

10
Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

Kembali
Selanjutnya

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

**Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK**

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

**Data Responden**  
Nama serta detail responden

**Layanan**  
Layanan

**Form Kuesioner**  
Isian form kuesioner SPAK

**Kesan & pesan**  
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.  
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

☐ Saya bukan robot

**Simpan Data**

**Kembali** **Selanjutnya**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
 Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR  
 SULAWESI SELATAN  
<http://www.pn-makassar.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

**NILAI INDEKS**  
**4,00 / 100,00%**

Jumlah 93 RESPONDEN  
 Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 74  
 PEREMPUAN : 19  
 Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0  
 SD : 0 Diploma 3 : 0  
 SMP : 0 S1 : 39  
 SMU : 25 S2 : 21  
 Diploma 1 : 5 S3 : 3  
 Pekerjaan PNS : 1 SWASTA : 2  
 TNI : 0 WIRAUSSAHA : 3  
 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0  
 LAINNYA : 87

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?                                                    | 4,000 |
| 2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 4,000 |
| 3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?                    | 4,000 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

**DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI**

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Oktober 2023  
 Ketua Pengadilan Negeri

-25-

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA

## DAN REFORMASI BIROKRASI

## NOMOR 14 TAHUN 2017

## TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
MASYARAKAT

## UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

| Populasi<br>(N) | Sampel<br>(n) | Populasi<br>(N) | Sampel<br>(n) | Populasi<br>(N) | Sampel<br>(n) |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 10              | 10            | 220             | 140           | 1200            | 291           |
| 15              | 14            | 230             | 144           | 1300            | 297           |
| 20              | 19            | 240             | 148           | 1400            | 302           |
| 25              | 24            | 250             | 152           | 1500            | 306           |
| 30              | 28            | 260             | 155           | 1600            | 310           |
| 35              | 32            | 270             | 159           | 1700            | 313           |
| 40              | 36            | 280             | 162           | 1800            | 317           |
| 45              | 40            | 290             | 165           | 1900            | 320           |
| 50              | 44            | 300             | 169           | 2000            | 322           |
| 55              | 48            | 320             | 175           | 2200            | 327           |
| 60              | 52            | 340             | 181           | 2400            | 331           |
| 65              | 56            | 360             | 186           | 2600            | 335           |
| 70              | 59            | 380             | 191           | 2800            | 338           |
| 75              | 63            | 400             | 196           | 3000            | 341           |
| 80              | 66            | 420             | 201           | 3500            | 346           |
| 85              | 70            | 440             | 205           | 4000            | 351           |
| 90              | 73            | 460             | 210           | 4500            | 354           |
| 95              | 76            | 480             | 214           | 5000            | 357           |
| 100             | 80            | 500             | 217           | 6000            | 361           |
| 110             | 86            | 550             | 226           | 7000            | 364           |
| 120             | 92            | 600             | 234           | 8000            | 367           |

-26-

|     |     |      |     |         |     |
|-----|-----|------|-----|---------|-----|
| 130 | 97  | 650  | 242 | 9000    | 368 |
| 140 | 103 | 700  | 248 | 10000   | 370 |
| 150 | 108 | 750  | 254 | 15000   | 375 |
| 160 | 113 | 800  | 260 | 20000   | 377 |
| 170 | 118 | 850  | 265 | 30000   | 379 |
| 180 | 123 | 900  | 269 | 40000   | 380 |
| 190 | 127 | 950  | 274 | 50000   | 381 |
| 200 | 132 | 1000 | 278 | 75000   | 382 |
| 210 | 136 | 1100 | 285 | 1000000 | 384 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR